

ANALISIS STRATEGI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI (KPE) BAGANSIAPIAPI DI PROVINSI RIAU

Heri Apriyanto

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT, Jakarta

Abstract

Most of Country Border Area in Indonesia are underdeveloped area with limited social and economic infrastructure. On the adjacent area, the neighbor country such as Malaysia that adjacent with Sumatera already developed growth centers and border corridors with so many economic activities and trade. The disparity among country can not be avoided, mostly in economic aspect. To develop Country Border Area as equal with neighbor country and surrounding area, it is needed policy to establish Economic Development Area (KPE) in Country Border Area. KPE is an area consist of some districts in border area that functionally bond to develop integrated superior economic. One of KPE developed is KPE Bagansiapiapi in Riau Province that adjacent with Malaysia. It has strategic location and abundant natural resources, but limited infrastructure as a constrain on economic development. For that reason, it is needed to formulate KPE Bagansiapiapi Strategic Plan based on agropolitan-marine integrated development area (AMIDA) concept.

Kata kunci : kawasan perbatasan negara, KPE bagansiapiapi, AMIDA

1. PENDAHULUAN

Wilayah Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan perbatasan di bagian barat NKRI yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Wilayah ini tidak terlepas dari isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara, yang diantaranya adalah : keterbatasan sarana dan prasarana, eksploitasi sumberdaya alam dan kawasan yang tak terkendali baik oleh perambah dari dalam maupun luar negeri, dan keterbatasan kualitas SDM. Dampak dari hal-hal tersebut adalah semakin tertinggalnya pembangunan di kawasan perbatasan negara yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan tidak hanya dengan negara tetangga, tetapi dengan simpul-simpul ekonomi di dalam negeri. Akibat dari kesenjangan ini mengakibatkan kawasan perbatasan antar negara menjadi kawasan yang rawan dari aspek pertahanan dan keamanan, dan masyarakatnya tertinggal secara ekonomi serta terjadinya perusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara yang meliputi kesejahteraan masyarakat (*prosperity*), pertahanan dan keamanan negara (*security*), dan keberlanjutan lingkungan hidup (*sustainability*).

Guna mengembangkan kawasan perbatasan negara dalam rangka upaya mensejajarkan dengan negara tetangga dan wilayah lainnya maka disusun suatu kebijakan pengembangan wilayah berupa pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE). KPE ini sebagai upaya perwujudan strategi spasial pemanfaatan ruang kawasan, yang didukung dengan pengembangan sektor-sektor unggulan pada masing-masing KPE. Pengembangan KPE diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai "beranda depan" negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga serta mampu mendorong pengembangan kegiatan ekonomi setempat sebagai modal untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar negara. Kebijakan KPE tersebut muncul dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam rancangan peraturan ini dikemukakan bahwa KPE merupakan salah satu bentuk kebijakan dan strategi spasial pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, baik darat maupun laut. Kawasan Pengembangan Ekonomi itu sendiri adalah kawasan yang mencakup beberapa

kecamatan yang terikat secara fungsional dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan secara terpadu.

Di Provinsi Riau terdapat empat KPE yang akan dikembangkan, yaitu KPE Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir), KPE Dumai-Rupat (Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis), KPE Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) dan KPE Selat Panjang (Kabupaten Bengkalis) (Ditjen Penataan Ruang, 2006). Dalam makalah ini pembahasan dikhususkan pada analisis strategi pengembangan untuk KPE Bagansiapiapi. KPE Bagansiapiapi ini berbatasan dengan Negara Malaysia yang dipisahkan dengan Selat Malaka, dimana selat ini merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup ramai. Namun letak yang strategis dan potensi wilayah (ekonomi, dan SDA) yang ada, belum termanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Wilayah ini masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kota Dumai dan Bengkalis, apalagi dengan negara bagian di Malaysia.

Tujuan analisis ini adalah tersusunnya strategi pengembangan KPE Bagansiapiapi sehingga dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut sekaligus menjadi pemicu pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya.

2. BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan untuk mengkaji strategi pengembangan KPE Bagansiapiapi adalah kondisi internal dan eksternal dari wilayah Bagansiapiapi dan Provinsi Riau. Kondisi ini meliputi kondisi fisik (termasuk *positioning* dan sumberdaya alam), perekonomian, sosial, budaya, kependudukan, dan infrastruktur wilayah. Selain itu juga dibutuhkan berbagai macam kebijakan yang terkait dengan rencana pengembangan wilayah, seperti RTRWN, RTR Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Riau, RTRW Kabupaten Rokan Hilir dan RTR Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Provinsi Riau, serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Peta-peta tematik seperti peta topografi, geologi, tanah, kesesuaian lahan, peta aliran sungai dan peta bencana juga digunakan untuk mendukung analisis wilayah.

Metode yang digunakan untuk menentukan strategi pengembangan KPE ini adalah analisis SWOT. Analisis ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan (analisis lingkungan internal) dan faktor-faktor peluang dan ancaman (analisis lingkungan eksternal) (Rangkuti, Freddy, 1997). Analisis untuk penentuan skenario ini terbagi menjadi 4 (empat) komponen dasar yaitu :

- Kekuatan (*Strength*), merupakan faktor-faktor

internal yang bisa dijadikan kunci sukses pengembangan KPE Bagansiapiapi.

- Kelemahan (*Weakness*), yakni faktor-faktor internal yang bisa menjadi sumber ketidakberhasilan pengembangan KPE Bagansiapiapi
- Peluang (*Opportunity*), adalah kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan KPE Bagansiapiapi jika bisa dimanfaatkan dengan baik.
- Ancaman (*Threat*), yakni kondisi eksternal (lingkungan strategis) yang dapat memberikan dampak negatif bagi pengembangan KPE Bagansiapiapi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Dengan mengacu pada matriks hubungan antara kekuatan dan peluang (S-O), dan kelemahan dan ancaman (W-T) maka selanjutnya dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk pengembangan KPE Bagansiapiapi.

Untuk deliniasi wilayah KPE Bagansiapiapi, sebagai dasar digunakan kriteria yang berasal dari Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Adapun kriteria pembentukan KPE tersebut sebagai berikut :

- a) Merupakan satu kesatuan wilayah administrasi pembangunan, dimana letak geografis kecamatan yang berbatasan langsung mempunyai jarak dari garis batas ≤ 50 km.
- b) Mempunyai potensi pengembangan sektor unggulan, dimana tingkat kesesuaian lahan tinggi (S2-S1), produktivitas komoditas tinggi (di atas rata-rata provinsi), dan kecenderungan permintaan ekspor komoditas positif (sedang hingga tinggi).
- c) Sektor unggulan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan untuk jangka waktu 20 tahun.
- d) Berada dalam satu sistem pusat pelayanan dimana mempunyai kesamaan pusat pelayanan (ibukota kabupaten/kota) dan aksesibilitas ke pusat pelayanan tinggi (tersedia sarana dan prasarana).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil KPE Bagansiapiapi

KPE Bagansiapiapi secara administrasi terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan deliniasi menurut kriteria pembentukan KPE maka kawasan ini terdiri dari 4 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai batas langsung

dengan Negara Malaysia (Selat Malaka), yaitu meliputi Kecamatan Pasir Limau Kapas (ibukota Panipahan), Kecamatan Kubu (ibukota Teluk Merbau), Kecamatan Bangko (ibukota Bagansiapiapi) dan Kecamatan Sinaboi (ibukota Sinaboi) dengan luas daratan sekitar 2.600 km² atau kira-kira 30% dari luas kabupaten seluruhnya. Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya ditetapkan di Ujung Tanjung (UU RI No 53 tahun 1999) telah dipindah ke Bagansiapiapi (UU RI No.34 Tahun 2008). Secara administratif, wilayah KPE Bagansiapiapi mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Hampar, Bangko Pusako, Simpang Kanan, dan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

Secara geografis, keberadaan KPE Bagansiapiapi cukup strategis untuk kegiatan perdagangan karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan terletak di jalur pelayaran internasional (ALKI I). Wilayah KPE ini menjadi lokasi bermuaranya sungai-sungai yang cukup besar yang pada umumnya merupakan lintas kabupaten. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari hulu di Kabupaten Rokan Hulu sampai muaranya di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Bangko, dan Sungai Sinaboi. Namun kondisi sungai-sungai tersebut sebagian besar mengalami sedimentasi yang cukup tinggi, terutama Sungai Rokan yang menjadi salah satu urat nadi perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Untuk tutupan lahan di KPE Bagansiapiapi didominasi oleh gambut, bakau, dan hutan serta perkebunan. Permukiman hanya terkonsentrasi di Kota Bagansiapiapi dan ibukota-ibukota kecamatan. Di KPE Bagansiapiapi ini terdapat beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Halang, Pulau Jemur, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran dan Pulau Sinaboi.

Jumlah penduduk KPE Bagansiapiapi pada tahun 2007 tercatat sebanyak 159.236 jiwa (www.rokanhilir.go.id), yang berarti sekitar 31% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduknya adalah sekitar 60 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk sekitar 4,87% setiap tahunnya, sedikit di atas tingkat pertumbuhan penduduk yang dicapai Provinsi Riau (4,61% per tahun). Kecenderungan penambahan penduduk seperti ini cukup positif bagi KPE Bagansiapiapi untuk mempercepat pembangunannya dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain yang sudah maju, terutama daerah-daerah di sekitarnya seperti KPE Dumai-Rupat.

Infrastruktur wilayah yang dimiliki KPE Bagansiapiapi masih terbatas. Padahal, sebagai suatu kawasan pengembangan ekonomi yang berada di Selat Malaka, posisinya sangat strategis dan sudah seharusnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tersedia harus memadai karena merupakan kunci bagi pengembangan kawasan ini. Hingga kini, transportasi laut di KPE Bagansiapiapi masih memegang peranan sangat penting. Sebagai wilayah yang berada di perbatasan, perdagangan antarnegara yang didistribusikan melalui transportasi laut sudah menjadi kegiatan rutin. Rencana peningkatan pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Pelabuhan di KPE Bagansiapiapi

Pelabuhan	Jenjang Fungsi	Jenis Angkutan	Jaringan Pelayanan
Sinaboi	Pel. Nasional	Penumpang & barang/ konvensional	Domestik & internasional
Bagan siapiapi	Pel. Regional	Barang/ konvensional	Domestik
Pulau Halang	Pel. Regional	Penumpang & barang/ konvensional	Domestik
Pani pahan	Pel. Regional		Domestik & lintas batas
Tj. Lumba-lumba	Pel. Regional	Barang/ konvensional	Domestik & lintas batas

Sumber : *Bappeda Provinsi Riau, 2001*

Di sektor ekonomi, selama periode 2000-2004, PDRB Kabupaten Rokan Hilir menurut harga konstan 2000 memperlihatkan fluktuasi. Pada tahun 2000 PDRB daerah ini telah mencapai Rp9.483.775 juta, namun setahun kemudian merosot sekitar 1,20% menjadi Rp9.369.721 juta. Meskipun sempat bangkit dalam dua tahun berikutnya dengan mencatat laju masing-masing 3,75% (menjadi Rp9.721.234 juta) dan 1,67% (Rp9.883.279 juta), tetapi memasuki tahun 2004 kembali berkontraksi sebanyak -0,91% untuk menggapai angka Rp9.793.555 juta. Akibat dari fluktuasi ini, laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kabupaten Rokan Hilir hanya mencapai 0,83% per tahun sepanjang rentang waktu 2000-2004.

Sektor perikanan masih menjanjikan dan merupakan salahsatu komoditas unggulan bagi KPE Bagansiapiapi ini. Hal ini terbukti dengan produksi perikanan khususnya perikanan tangkap (lihat Tabel 2). Selain itu terdapat industri galangan kapal kayu dengan produksi sebanyak 55 unit per tahun dan 200 kapal motor pertahun.

Tabel 2. Produksi perikanan di KPE Bagansiapiapi tahun 2005

No	Kecamatan	Penangkapan Laut (ton)
1.	Bangko	372
2.	Kubu	202
3.	Pasir Limau Kapas	1.137
4.	Sinaboi	342
	Jumlah	2.053

Sumber : www.rokanhilir.go.id

Berdasarkan RTRW Kabupaten Rokan Hilir (Bappeda Kab. Rokan Hilir, 2002), sistem kota-kota yang terdapat di KPE Bagansiapiapi meliputi Kota Bagansiapiapi sebagai PKW, kemudian Kota Sinaboi (Kec. Sinaboi), Kota Tanjung Lumbalumba (Kec. Kubu), dan Kota Panipahan (Kec. Pasir Limau Kapas). Sedangkan berdasarkan pola ruang maka di wilayah KPE Bagansiapiapi meliputi :

- Kawasan Lindung
 - Kawasan Pusat Perlindungan Penyu di Kawasan Pulau Jemur, hutan lindung gambut di sebagian wilayah Kecamatan Pasir Limau dan Kubu, serta beberapa kawasan pantai di kecamatan-kecamatan yang terletak di pesisir.
- Kawasan Budidaya
 - Kawasan pertanian tanaman pangan (padi)
 - Kawasan perkebunan besar (kelapa sawit)
 - Kawasan perikanan di pesisir pantai
 - Kawasan pariwisata di Pulau Jemur dan wisata religius di Bangko
 - Kawasan *agroforestry*

- Kawasan permukiman

3.2. Matriks Analisis SWOT KPE Bagansiapiapi

Dalam rangka penyusunan strategi pengembangan maka dilakukan analisis kondisi KPE Bagansiapiapi baik dari berbagai aspek, yaitu fisik/geografis, sumberdaya alam, kemampuan lahan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan, keselamatan negara. Analisis dilakukan terhadap yang ada pada saat ini maupun proyeksinya ke depan, sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan pengembangan wilayah ini sebagai KPE (lihat Tabel 3.).

Dalam rangka menjalankan misi sebagai kawasan pengembangan ekonomi, maka dapat ditempuh beberapa langkah strategis, yaitu mengoptimalkan kekuatan atau potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan peluang sebanyak mungkin, dan meminimalkan kelemahan yang ada dengan selalu berupaya mengatasi tantangan atau ancaman yang dihadapinya. Dengan mengacu pada matriks hubungan antara kekuatan, peluang, dan kelemahan serta ancaman seperti yang diperlihatkan pada tabel sebelumnya, maka langkah-langkah strategis untuk mengembangkan wilayah Bagansiapi dan sekitarnya sebagai KPE dapat dirumuskan seperti pada subbab berikut.

Tabel 3. Ringkasan matriks SWOT KPE Bagansiapiapi

No	Aspek	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Geografi dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi geografis yang strategis dan Potensi SDA besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan rawa, pengelolaan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Dekat pasar, kuantitas SDM cukup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelundupan dan pencemaran lingkungan
2.	Satuan Kemampuan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan datar mudah dikelola, kuantitas air cukup, daya dukung memadai, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas air kurang baik, rawan banjir, abrasi dan erosi pantai 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambangan bahan galian dan pemanfaatan lahan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rawan intrusi air laut
3.	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pelabuhan dan akses transportasi ke jalur perdagangan internasional • Memiliki akses darat ke pasar dan pusat pertumbuhan di dalam negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas listrik, air dan telekomunikasi masih sangat terbatas • Kapasitas prasarana dan sarana transportasi masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi sektor primer (perikanan dan perkebunan) • Perdagangan lintas batas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi kawasan saat ini masih lambat • Minat investasi masih rendah
4.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki beberapa sektor, subsektor, dan komoditas unggulan di level provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi ekspor terhadap Provinsi Riau masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan ekonomi regional mendatangkan perluasan akses pasar bagi KPE ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian di luar kawasan memiliki daya saing yang lebih kuat

Sumber : Hasil Analisis

3.2.1. Strategi S – O

Strategi yang dirumuskan di sini pada prinsipnya mendasarkan pada faktor internal yang mendukung pengembangan Bagansiapiapi sebagai KPE dan faktor eksternal yang memberikan peluang bagi upaya pengembangan itu sendiri. Dari hasil identifikasi kedua faktor tersebut, diperoleh langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Dengan di dukung posisi dan pasar strategis untuk pemasaran dan investor produk unggulan maka diperlukan suatu kerjasama dengan daerah penunjang dan juga negara tetangga, khususnya Malaysia. Untuk itu penyiapan basis data (*database*) sangat penting dan bersifat transparan. Infrastruktur juga harus disiapkan. Selanjutnya dapat dibuka akses langsung ke Malaysia.
- 2) Dengan potensi SDA yang cukup besar, baik perkebunan maupun tambang, maka perlu dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 3) Dengan adanya sungai-sungai yang cukup besar maka perlu perencanaan pemanfaatan dan pengelolaannya secara baik sehingga lebih berdaya guna.

3.2.2. Strategi W – T

Perumusan strategi di sini difokuskan pada upaya mereduksi faktor internal yang menghambat (kelemahan), dan dibarengi dengan mengantisipasi faktor eksternal yang mengancam dalam pengembangan Bagansiapiapi sebagai KPE. Hasil rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun prioritas pembangunan infrastruktur. Hal ini perlu dilakukan karena terbatasnya pendanaan. Perencanaan harus secara komprehensif dengan memperhatikan tidak hanya lokasi KPE tetapi juga wilayah pendukungnya.
- 2) Memperkuat koordinasi antar sektor dan antar daerah yang diharapkan program yang akan dilaksanakan terfokus dan saling bersinergis. Hal ini tidak hanya dilakukan di wilayah KPE saja tetapi juga kabupaten, provinsi maupun nasional. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih program dan persaingan yang tidak sehat dengan wilayah.
- 3) Meningkatkan kesadaran para *stakeholders* akan pentingnya kelestarian DAS Rokan. Monitoring pengelolaan DAS ini untuk mengatasi sedimentasi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran. Diperlukan strategi pengelolaan DAS secara terintegrasi.

- 4) Menyusun regulasi yang terkait dengan pemilikan lahan dan tapal batas.

3.2.3. Strategi S – T

Dalam merumuskan strategi ini, faktor internal yang mendukung upaya pengembangan KPE akan dimantapkan, sedangkan faktor eksternal yang bersifat ancaman akan diperkecil. Dengan skenario tersebut, maka strategi pengembangan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan ketahanan dan keamanan daerah/nasional. Dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjamin keamanan investor maupun pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya di KPE ini.
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi. Hal ini untuk menarik investasi dan pengembangan produk unggulan melalui kemudahan regulasi dan keamanan usaha. Dalam usaha menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi, diperlukan kemudahan dan kejelasan dalam hal regulasi. Hambatan birokrasi sesegera mungkin diadukan dengan cara deregulasi dan debirokratisasi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan keandalan produk unggulan melalui penetapan standar mutu hasil produksi.

3.2.4. Strategi W – O

Perumusan strategi ini mengedepankan upaya meminimalkan kelemahan dengan dibarengi langkah-langkah pemanfaatan peluang secara baik agar dapat memperkuat potensi yang ada. Dengan dasar ini, maka strategi pengembangan yang diperlukan adalah :

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur. Dengan demikian aksesibilitas ke lokasi dan pendistribusian hasil produk tidak sulit, sehingga menekan biaya operasional.
- 2) Membangun sarana pengolahan lebih lanjut untuk tidak hanya menghasilkan bahan baku saja, tetapi produk memiliki nilai tambah.

Selanjutnya strategi-strategi di atas diringkas berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan KPE Bagansiapiapi yang hasilnya adalah sebagai berikut :

- Tata ruang : Keterpaduan dalam penyusunan tata ruang dan optimalisasi pemanfaatan ruang
- Pertahanan, keamanan dan keselamatan : Peningkatan pengamanan zona pertahanan dan kerjasama pengamanan jalur pelayaran Selat Malaka
- Perbatasan antar negara : Kerjasama perdagangan dan pengelolaan ZEE

- Kemampuan lahan/rawan bencana : Pemulihan kualitas lingkungan dan pemanfaatan bahan galian secara efisien
- Infrastruktur : Perluasan jaringan transportasi ke luar negeri (lintas batas) dan pusat pertumbuhan di dalam negeri, khususnya untuk mendukung sektor unggulan
- Ekonomi regional : Peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi ekonomi
- Sektor unggulan : Agroindustri dan perkebunan, industri pengolahan, kelautan, dan perdagangan
- Kelembagaan : Pengembangan kawasan agropolitan dan kelautan terpadu (PKAKT) atau *agropolitan-marine integrated development area* (AMIDA).

3.3. Konsep Pengembangan KPE Bagansiapiapi

Konsep pengembangan KPE Bagansiapiapi adalah pengembangan kawasan agropolitan dan kelautan terpadu (PKAKT) atau *agropolitan-marine integrated development area* (AMIDA). Secara sederhana, PKAKT atau AMIDA adalah sebuah konsep pengembangan wilayah/kawasan yang berbasis pada potensi agroindustri dan sumberdaya kelautan, terutama perikanan. Adapun dasar pertimbangan :

- Karakteristik KPE Bagansiapiapi terdiri dari dua karakter kawasan, yakni kawasan daratan (*inland*) dan kawasan perairan laut (*marine*).
- Potensi KPE Bagansiapiapi terdiri dari :
 - Agroindustri berbasis kelapa sawit dan karet.
 - Budidaya ikan laut, penangkapan ikan laut, industri perikanan laut, industri perkapalan, pariwisata pulau, transportasi laut.
 - Perdagangan regional dan antarnegara.

Keterpaduan antara kawasan agropolitan dan kelautan dapat diwujudkan dalam bentuk kawasan sentra bisnis (*Central Business District*/CBD) di wilayah pesisir, khususnya di Kota Bagansiapiapi.

3.4. Strategi Pengembangan KPE Bagansiapiapi

Berdasarkan analisis dan konsep yang telah disusun maka strategi pengembangan KPE Bagansiapiapi menurut sektor adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi pengembangan Komoditas/jasa Unggulan AMIDA melalui :
 - a) Pengembangan kawasan agropolitan.
 - b) Pengembangan kawasan pesisir.
 - c) Pengembangan kawasan sentra bisnis.
 - d) Pengembangan kawasan pariwisata.
 - e) Pengembangan pemasaran.
 - f) Pengembangan kelembagaan.
- 2) Tata Ruang :

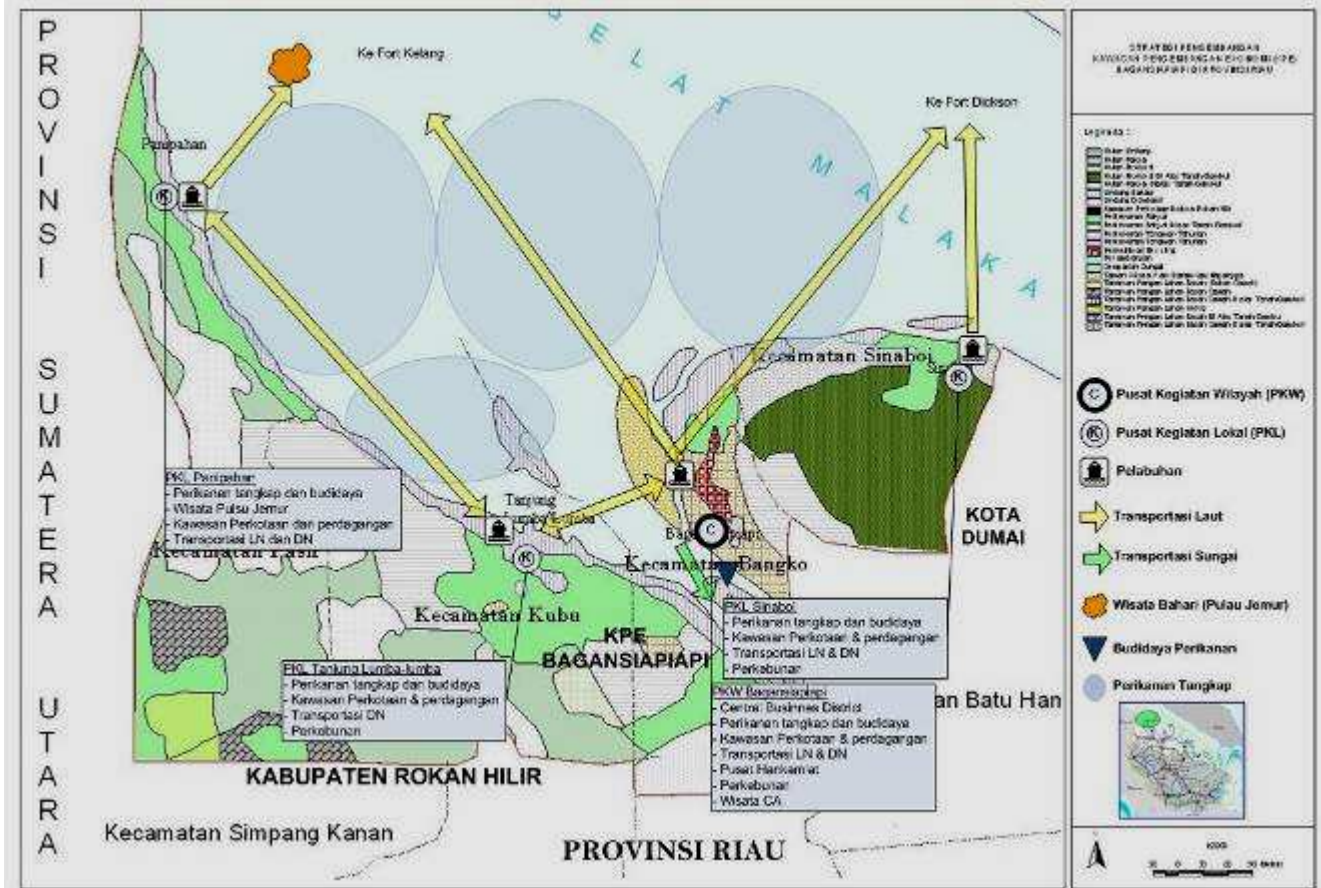
- a) Pemantapan fungsi-fungsi masing-masing pusat pelayanan dan struktur ruang dan keterkaitannya
 - b) Penyiapan pintu gerbang keluar-masuk negara tetangga baik barang maupun orang.
 - c) Peningkatan utilitas dan fasum/fasos
 - d) Pemantapan kawasan lindung dan kawasan konservasi serta pengelolaan kawasan gambut
 - e) Penetapan arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung arahan AMIDA.
 - f) Pengembangan kawasan perikanan tangkap, budidaya ikan dan kawasan pengolahan ikan serta sarana dan prasarana pendukungnya
 - g) Penyiapan CBD terutama di pusat pertumbuhan Kota Bagansiapiapi
- 3) Pengembangan Sistem transportasi :
 - a) Jalan antara Bagansiapiapi dengan Bagan Batu dan Ujung Tanjung harus ditingkatkan menjadi jalan arteri primer dan pengembangan jalan kolektor primer bertujuan menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL
 - b) Peningkatan kapasitas jalan yang ada, untuk angkutan berat hasil pertanian (sawit)
 - c) Membuka jalan jalur pantai Sinaboi – Dumai
 - d) Pengembangan jaringan antara pusat-pusat produksi dengan pusat pengumpul dan distribusi
 - e) Pengembangan jaringan antar pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat pengumpul dan distribusi (dari Bagansiapiapi ke arah hulu sungai)
 - f) Peningkatan jenjang fungsi pelabuhan Bagansiapiapi, Sinaboi, Panipahan, dan Tanjung Lumba-lumba dan diantaranya dijadikan sebagai jalur penyeberangan antar negara (Port Dickson dan Port Klang, Malaysia)
 - 4) Pengembangan Sumberdaya Air melalui peningkatan kualitas wilayah sungai bagi penyediaan air baku (konservasi daerah resapan air) terutama DAS Rokan; dan peningkatan kualitas sistem prasarana sumberdaya air (pengolahan air baku dan jaringan)
 - 5) Pengembangan Energi dan Tenaga Listrik melalui peningkatan kapasitas dan jaringan listrik serta pemanfaatan sumber energi alternatif, misal melalui bahan bakar nabati maupun mikrohidro
 - 6) Pengembangan Telekomunikasi melalui peningkatan jaringan/kapasitas sambungan, pengembangan telepon seluler dan pengembangan jaringan dan pelayanan internet

3.5. Rencana Pemanfaatan Ruang KPE Bagansiapiapi

Berdasarkan analisis pada sektor unggulan dimiliki KPE Bagansiapiapi, maka sektor perikanan dan kelautan, pariwisata dan perkebunan (kelapa sawit) merupakan prioritas untuk mewujudkan AMIDA. Sedangkan sebagai sektor penunjang

adalah pertanian (tanaman pangan). Dengan demikian pemanfaatan kawasan budidaya didorong untuk dapat menunjang sektor-sektor unggulan tersebut.

Rencana Tata Ruang, Rencana Pengembangan Klaster Kawasan Prioritas dan Rencana Jaringan Transportasi di KPE Bagansiapiapi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Strategi Pengembangan KPE Bagansiapiapi
Sumber : Hasil Analisis

4. KESIMPULAN

Salah satu upaya untuk mengembangkan kawasan perbatasan negara adalah pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE). Hal ini bertujuan untuk dapat mensejajarkan kawasan perbatasan negara yang pada umumnya termasuk daerah tertinggal, dengan negara tetangga maupun wilayah lainnya. Salah satu kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau adalah Kota Bagansiapiapi dan sekitarnya ditetapkan sebagai KPE. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap semua aspek yang ada dan proyeksi ke depan, maka strategi utama pengembangan KPE Bagansiapiapi ini adalah dikembangkan sebagai kawasan agropolitan dan kelautan terpadu (PKAKT) atau *agropolitan-marine integrated development area* (AMIDA). Hal ini didasari oleh

sektor perikanan dan kelautan, pariwisata dan perkebunan yang merupakan komoditas prioritas, dengan pusat perdagangan di Kota Bagansiapiapi. Untuk itu program-program semua sektor seperti Rencana Tata Ruang (RTR), pengembangan infrastruktur, dan kelembagaan yang direncanakan harus mendukung terbentuknya AMIDA ini. Dengan demikian pendekatan kawasan perbatasan negara tidak hanya dari pendekatan *security*, tetapi juga *prosperity* dan *sustainability*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi Riau, 2001, *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001-2015*, Pekanbaru.
- Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, 2002, *Rencana*

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012, Bagansiapiapi.

<http://www.rokanhilir.go.id/images/potensi-perikananlaut.gif>, Diakses tanggal 20 Juli 2008.

Ditjen Penataan Ruang, 2006, *Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau*, Jakarta.

Rangkuti, Freddy, 1997, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.